



KETUA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

MATERI SEMINAR **"BUDAYA DEMOKRASI DAN MENTAL PEMIMPIN YANG KORUP"**

Disampaikan pada Kongres Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama (ISNU) ke-1
di Auditorium UNISDA Lamongan, Jawa Timur, 19 Februari 2012.

Assalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh.

Yang terhormat,

- **Pengurus Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama,**
- **Para doktor dan guru besar di Lingkungan Nahdlatul Ulama,**
- **Segenap akademisi dan kalangan perguruan tinggi,**
- **Hadirin yang berbahagia,**

Dengan terlebih dahulu mempersembahkan rasa syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, ijinkan saya menyampaikan terimakasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya, untuk memberikan materi seminar dalam acara Kongres Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama (ISNU) ke-1. Dari Panitia, tema seminar yang diberikan kepada saya hari ini adalah "benarkah budaya demokrasi Indonesia menghasilkan mental pemimpin yang korup?", saya kira cukup relevan untuk kita bahas.

Hadirin yang saya hormati,

Dalam khasanah ilmu politik, demokrasi, baik dalam bentuk sistem, budaya, sampai kepada perikal, diyakini sebagai sebuah **nilai yang baik meskipun bukan yang terbaik**. Kata mantan Perdana Menteri Inggris Winston Churchill, sistem demokrasi memang bukanlah sistem yang terbaik, namun saat ini belum ada sistem yang lebih baik dari demokrasi. Artinya, kita masih dalam taraf menjalankan sekaligus mengkoreksi nilai-nilai demokrasi tersebut.

Sebagai sistem sosial maupun politik yang ideal, demokrasi menyediakan ruang bagi kita untuk menciptakan: [1] kebaikan bersama, [2] identitas bersama, [3] hubungan kekuasaan, [4] legitimasi kewenangan yang diatur dalam konstitusi, [5] hubungan politik dengan ekonomi.¹

Dalam kehidupan masyarakat yang demokratis juga ditanamkan norma dan nilai pokok yang harus menjadi acuan seluruh penduduk, yaitu:² *pertama*, kesadaran akan kemajemukan (pluralitas). Jika norma ini dijalankan diharapkan dapat mencegah meunculnya sikap dan pandangan hegemoni mayoritas dan tirani minoritas.

¹ Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik* (Jakarta: Grasindo, 2010), hal. 290-295.

² A. Ubaedillah dan Abdul Rozak (penyunting), *Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan masyarakat madani* (Jakarta: ICCE dan UIN Syarif Hidayatullah, 2006), hal. Nurcholish Madjid, *Cita-Cita Politik Islam Era Reformasi* (Jakarta: Paramadina, 1999), hal. 105-113 dan 183-199.

Kedua, musyawarah. Makna dan semangat musyawarah ialah mengharuskan adanya kedewasaan warganegara untuk secara tulus menerima negosiasi dan kompromi-kompromi sosial dan politik secara damai dan bebas dalam setiap keputusan bersama.

Ketiga, cara harus sejalan dengan tujuan. Demokrasi pada hakikatnya tidak hanya sebatas pelaksanaan prosedur-prosedur demokrasi (pemilu, suksesi, dan aturan mainnya), tetapi harus dilakukan secara santun dan beradab yakni melalui proses demokrasi yang dilakukan tanpa paksaan, tekanan, dan ancaman dari dan oleh siapapun, tetapi dilakukan secara sukarela, dialogis dan saling menguntungkan.

Keempat, norma kejujuran dalam permufakatan. Prinsip ini erat kaitannya dengan paham musyawarah. Musyawarah yang baik dan benar hanya akan berlangsung jika masing-masing pribadi atau kelompok memiliki pandangan positif terhadap perbedaan pendapat dan orang lain.

Kelima, kebebasan nurani, persamaan hak, dan kewajiban. Norma ini harus diintegrasikan dengan sikap percaya pada iktikad baik orang dan kelompok lain agar saling berbagi untuk kemaslahatan bersama atau untuk melakukan kompromi dengan pihak-pihak yang berbeda-beda.

Dan *keenam*, percobaan dan salah. Demokrasi bukanlah sesuatu yang telah selesai dan siap saji, tetapi merupakan sebuah proses tanpa henti. Dalam kerangka ini demokrasi membutuhkan percobaan-percobaan dan kesediaan semua pihak untuk menerima

kemungkinan ketidaktepatan atau kesalahan dalam praktik berdemokrasi.

Hadirin yang Berbahagia,

Meskipun demokrasi dalam retorikanya "**nampak baik**", dalam literatur ilmu politik, memilih sistem pemerintahan demokrasi sesungguhnya adalah pilihan yang ber-resiko, paling tidak jika dibandingkan dengan sistem pemerintahan lainnya.

Demokrasi, ringkasnya adalah rakyat berkuasa, atau banyak orang **mau** berkuasa. Jika kita bandingkan dengan sistem monarkhi misalnya, paling tidak dalam sistem atau budaya monarkhi, akan hanya ada satu penguasa dan lainnya, baik terpaksa maupun sukarela, masih mau dikuasai. Atau olygarkhi, yaitu, dimana sekelompok orang berkuasa dan lainnya, baik terpaksa maupun sukarela, masih mau dikuasai. Sementara, polyarkhi (yang mirip dengan demokrasi), adalah semua orang berkuasa, dan lainnya, baik terpaksa maupun sukarela, mungkin tidak mau dikuasai. Semua orang merasa berhak dan mempunyai kesempatan yang sama untuk berkuasa.

Masalahnya adalah, jalan untuk mencapai kekuasaan tersebut, apakah ditempuh dengan cara yang "halal" ataukah tidak? Korupsi atau tidak? Hal ini sangat berkait erat dengan pemahaman kita terhadap demokrasi.

Hadirin yang Berbahagia,

Sejak kemerdekaan, pendiri bangsa ini sudah sepakat, bahwa nilai-nilai demokrasi akan ditegakkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sebagai sistem, kita pernah **jatuh-bangun mempraktekkan** demokrasi, baik demokrasi liberal, terpimpin, sampai demokrasi pancasila. Meskipun seringkali bangsa ini tidak percaya dengan sistem demokrasi, dengan berusaha menggantinya dengan paham komunis atau paham agama tertentu, namun kita masih percaya bahwa nilai-nilai demokrasi masih merupakan **yang terbaik**. Bahkan semenjak Reformasi 1998, kita menegaskan kembali paham demokrasi, baik sebagai sistem, budaya, ataupun perilaku demokratis. Hanya saja, proses ber-demokrasi kita, **belum sesuai harapan**. Di “alam demokrasi” kita sekarang ini, kita justru mendapati bahwa perilaku korupsi, kolusi dan nepotisme (kkn), **belum surut**. Sebagaimana kekuasaan yang ingin **didapatkan oleh banyak orang**, korupsi juga **dilakukan oleh banyak orang**.

Indeks Persepsi Korupsi (IPK) yang dilakukan oleh Transparency International, pada tahun 2010 survei yang mencakup 178 negara, Indonesia berada pada peringkat 110 dengan nilai indeks **2,8**. Tahun 2011 pada peringkat 100 dari 182

negara, dengan nilai index **3,0**.³ Sementara, Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) yang dilakukan oleh Bappenas pada tahun 2009, menunjukkan bahwa tingkat demokrasi kita sebenarnya juga masih lemah, **63,30%**.⁴ Puskapol UI dan Lembaga Demos mensurvei bahwa Indeks Demokrasi Indonesia hanya berada pada kisaran **4,99** dari skala 0-10.⁵ Melihat angka-angka tersebut, kita dapat menyimpulkan bahwa, ditengah praktek berdemokrasi kita yang masih rendah, perilaku korupsi yang terjadi juga masih tinggi.

Hadirin yang Berbahagia,

Ada banyak faktor penyebab korupsi di Indonesia, seperti: rendahnya kesadaran masyarakat, mentalitas aparatur negara, lemahnya penegakan hukum, dan tidak adanya *political will* yang kuat dari pemerintah, politisi maupun pelaku bisnis untuk membangun Indonesia tanpa korupsi. Hasil penelitian Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) meyimpulkan bahwa faktor-faktor penyebab korupsi di Indonesia ada dalam empat aspek yaitu: aspek perilaku individu, aspek organisasi, aspek masyarakat, dan aspek peraturan perundang-undangan.

³ transparency international. diakses pada 17 november 2006. (sumber: wikipedia.co.id)

⁴ www.bappenas.go.id

⁵ www.demosindonesia.org

Perilaku atau mental korup, sebenarnya bisa dimiliki oleh siapapun, mulai dari rakyat kecil sampai para pemimpin. Korupsi juga bisa dilakukan dalam berbagai bentuk, seperti kolusi atau nepotisme. Permasalahannya adalah, apakah semakin demokratis bangsa kita, perilaku korupsi kita juga akan makin surut?. Artinya, jika kita membahas sistem pemerintahan, akankah perilaku korupsi para pemimpin kita berkorelasi dengan sistem demokrasi yang kita terapkan? Jawabannya tentu tidak didapatkan hanya dalam sebuah diskusi seperti yang kita lakukan sekarang ini. Namun memerlukan upaya yang kuat dengan niat baik (*political will*) untuk memahami demokrasi secara benar, dan menolak segala bentuk korupsi.

Hadirin yang Berbahagia,

Mensiasati sebuah sistem demokrasi yang kita praktekkan selama ini, seringkali diartikan sebagai "cara untuk memperoleh kekuasaan". Dan kekuasaan dipandang sebagai sebuah tujuan, bukan sebagai amanat dari rakyat (atau *demos*). Para "pelaku demokrasi" secara dangkal mengartikan bahwa tujuan demokrasi adalah kekuasaan itu sendiri, bukan keadilan dan kesejahteraan rakyat, sehingga yang nampak adalah korupsi ada akibat demokrasi.

Seorang bangsawan Inggris Abad ke-19 Lord Acton mengatakan: "*power tends to corrupt; absolute power tends to corrupt absolutely*". Kekuasaan memiliki korelasi positif dengan

perilaku korupsi. Korupsi biasanya dilakukan oleh orang yang memiliki kuasa, sedangkan **cara berkuasa** bisa dilakukan dalam sistem politik apapun, baik sistem demokrasi, komunis, monarki, atau bahkan teokrasi.

Dengan demikian, praktek korupsi sebenarnya dapat dilakukan oleh siapapun, dalam sistem dan paham apapun termasuk didalam sistem demokrasi. Yang pasti korupsi itu sangat erat korelasinya dengan kekuasaan, baik sebelum memiliki kekuasaan ataupun saat berkuasa.

Hadirin yang Berbahagia,

Dari keseluruhan faktor penyebab lahirnya korupsi di atas, kita tidak menemukan bahwa “budaya demokrasi” merupakan faktor penyebab lahirnya mental pemimpin yang korup. Penyebab korupsi lebih pada aspek individu, organisasi, kesadaran masyarakat, dan perundang-undangan.

Demikianlah pengantar diskusi kita hari ini, mudah-mudahan dapat membangun pemahaman kita tentang budaya demokrasi dan perilaku korupsi. Terimakasih

Wassalamu’alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh

Surabaya, 19 Februari 2012
KETUA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

Dr. H. Marzuki Alie